

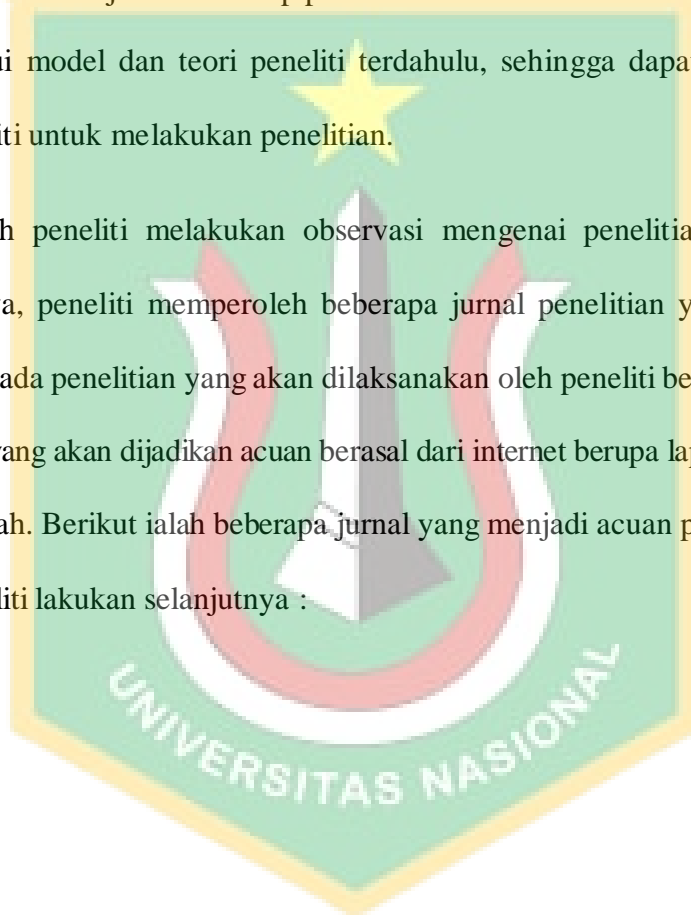
## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **II.1 Penelitian Terdahulu**

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti harus mengobservasi dengan cara melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui model dan teori peneliti terdahulu, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

Setelah peneliti melakukan observasi mengenai penelitian yang sudah ada sebelumnya, peneliti memperoleh beberapa jurnal penelitian yang dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. Penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan berasal dari internet berupa laporan yang ada pada jurnal ilmiah. Berikut ialah beberapa jurnal yang menjadi acuan pada penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya :



No	Judul Penelitian	Penulis	Tujuan	Metodologi Penelitian
1.	<i>Sosialisasi Hidup Sehat di Tengah Wabah Virus Corona, 2020</i>	Kiki Riska Ayu Kurniawati, Farah Heniati Santosa, Samsul Bahri	Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran covid-19.	Metode Deskriptif Kualitatif
2.	<i>Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi yang Dapat Digunakan Selama Masa Pandemi Covid -19, 2020</i>	Rinna Rachmatika, Kecitaan Harefa, Ny. Ayni Suwarni Herry, Joko Priambodo	tujuan pengabdian ini adalah untuk mengenalkan tool-tool yang ada dalam Google seperti google form, google drive kepada karang taruna di Perumahan Pondok Karya, Pondok Aren.	Metode Kualitatif
3.	<i>Sosialisasi kewirausahaan dlaam upaya peningkatan UMKM desa palangan kecamatan karangbinangun kabupaten lamongan, 2019</i>	Moh. Muklis Sulaeman	Melakukan pengembangan masyarakat dengan metode sosialisasi penanaman jiwa kewirausahaan dan bisnis online dilakukan untuk membantu memotivasi masyarakat untuk menjalankan usaha mandiri	Metode Kualitatif

4.	<i>Edukasi sadar bencana melalui sosialisasi kebencanaan sebagai upaya peningkatan pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana, 2019</i>	Muhammad Rizal Pahleviannur	Memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya pengetahuan mengenai mitigasi bencana	Metode Deskriptif Kualitatif
5.	<i>Sosialisasi penggunaan ecommerce dalam perkembangan bisnis di era digital, 2019</i>	Niki Ratama, Munawaroh, Sri Mulyati	Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan ecommerce lebih efektif jika digunakan pada era saat ini.	Metode Kualitatif



## II.2 Landasan Teori

### II.2.1 Teori Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers , yaitu *“as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system”*.<sup>2</sup>

Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain, sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan.

Teori difusi inovasi dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers. Dalam buku ciptaannya yang berjudul *“Diffusion of Innovations”* ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.

Teori yang dikemukakan Rogers tersebut yakin bahwa inovasi yang terdifusi ke seluruh masyarakat dengan pola yang dapat diprediksi. Rogers juga mendefinisikan difusi inovasi sebagai sebuah proses yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi

---

<sup>1</sup> Everett M. Rogers. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.

demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial.<sup>3</sup>

Kurva tersebut menjelaskan bahwa sebuah inovasi dikembangkan oleh seseorang yang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam kurva tersebut juga terdapat dua buah sumbu, satunya menjelaskan tingkat adopsi dan sumbu lainnya menjelaskan mengenai dimensi waktu. Tarde kemudian melihat peluang bahwa ada beberapa orang dalam kelompok tertentu yang memiliki ketertarikan terhadap ide dan hal-hal baru, sehingga mereka dinilai lebih memiliki pengetahuan yang luas jika dibandingkan dengan yang lainnya. Orang-orang dengan ketertarikan inilah yang kemudian dianggap bisa mempengaruhi komunitasnya untuk mengadopsi sebuah inovasi baru yang akan hadir.

Dalam hal ini perusahaan BUMN Pertamina yang menemukan sebuah inovasi baru yaitu sebuah aplikasi My Pertamina yang digunakan untuk melakukan controlling terhadap pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat menunjuk pihak SPBU untuk melakukan defusi mengenai inovasi baru ini. proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif

---

<sup>3</sup> Everett M. Rogers. 1983. Diffusion of Innovations. London: The Free Press

## II.3 Landasan Konsep

### II.3.1 Sosialisasi

George Herbert Mead dalam bukunya sosialisasi pemerintahan: “Sosialisasi merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya, ianya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku disekelilingnya. melalui, merasi, (*feeling*) dan percaya diri sendiri dan proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat”.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian sosialisasi yaitu proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya, melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui, merasi, (*feeling*) dan percaya diri dari proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat. Sosialisasi perlu diberi ke atas individu-individu dan tingkah lakunya. Di mana setiap individu memegang peranan yang berbeda dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Mead, berpandangan bahawa individu tersebut merupakan sebagian dari pada yang telah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Beliau menentang pandangan bahawa perilaku individu adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, walaupun kita memang perlu hidup bermasyarakat dan berkelompok, tetapi kita tidak semestinya mengikuti tingkah laku

---

<sup>4</sup> Herbert Blumer dan George Herbert Mead dalam Agus Salim (2008). pengantar sosiologi mikro, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

masyarakat/kelompok tersebut.

Menurut Peter Berger dalam bukunya yang berjudul “sosialisasi dalam kebijakan pemerintahan” mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi sebagai berikut: “Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat”.<sup>5</sup> Pengertian sosialisasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, dan proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam partisipasi masyarakat.<sup>6</sup>

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada.

Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

---

<sup>6</sup> Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Construction of Reality, (terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan." Jakarta: LP3ES: 1990.

Menurut Anderson dalam Tachjan mengatakan mengenai kebijakan bahwa: “kebijakan adalah serangkaian kebijakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Sedangkan Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam Wahab mengatakan bahwa: “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>7</sup> Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang paling sederhana dan rasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif sekarang ini.

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya. Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Maka dapat dikatakan seorang individu tidak pernah melakukan sosialisasi dengan sempurna, ia dapat diibaratkan sebagai seorang individu yang tidak utuh. Sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan yang telah di buat akan bermanfaat bila di sosialisasikan.

---

<sup>7</sup> Friedrich Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: Mc Graw-Hill



Menurut Harton dan Hunt sosialisasi kebijakan pada prinsipnya adalah “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Suatu program kebijakan harus di sosialisasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sosialisasi di pandang sebagai proses interaksi antara satu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan dimana didalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik di pakai secara bersama.

<sup>8</sup>Terlepasnya dari berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan, pada hakekatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula.

Sedangkan menurut Vembriarto sosialisasi kebijakan adalah “proses akomodasi dimana individu menahan, mengubah implus-implus dalam dirinya, dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menguraikan teori yang penulis pilih untuk dijadikan acuan dalam penulisan laporan KKL ini, sesuai judul yang penulis pilih.

Berikut adalah pengertian sosialisasi kebijakan yang di ungkap oleh George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul “Sosialisasi Kebijakan Publik”, yaitu: “Sosialisasi Kebijakan merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya. Ianya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui merasi, dan percaya diri sendiri dan proses sosialisasi

---

<sup>8</sup>Hogwood and Gunn. 2003. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Balai Pustaka. 1950.

dibudayakan sepanjang hayat”.<sup>9</sup>

Penggunaan terminologi sosialisasi harus memiliki kedudukan yang pasti terlebih dahulu dalam kajian kebijakan publik, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa pengertian dan konsep sosialisasi didasarkan kepada kedudukan tersebut, sehingga berbagai penelitian yang akan mengkaji masalah sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan benar dikarenakan telah memiliki kejelasan atas kedudukan sosialisasi. Didasarkan atas pemahaman tersebut di atas dengan dikaitkan kepada kajian terhadap proses kebijakan publik, maka sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan dilakukan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini.



a. Formulasi Kebijakan Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Jadi, analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa atau seluruh tahap dari proses

<sup>9</sup> Herbert Blumer dan George Herbert Mead dalam Agus Salim (2008). pengantar sosiologi mikro, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

pembuatan kebijakan. Dalam fase formulasi kebijakan para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan.<sup>10</sup>

b. Implementasi Kebijakan Menurut Dwijowijoto yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. dijelaskan juga oleh Putt Dan Springer “implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud kedalam praktik organisasi”. Tangkilisan berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan pimpinan.<sup>11</sup>

c. Evaluasi Kebijakan dimana kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah dilaksanakan. Begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung, selanjutnya perlu diperiksa. Sebagai proses manajemen, pengawasan adalah keharusan atau diperlukan sebagai proses pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauhmana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholder). Disisi lain, “evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan/tujuan dengan kenyataan yang dipakai” (Dwijowijoto). Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencapai kesalahan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 81-83

<sup>11</sup> Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal. Evaluasi kebijakan semata-mata bersifat positif dan konstruktif.<sup>12</sup>

Berdasarkan dengan tabel di atas, maka sosialisasi bukan merupakan rangkaian dari proses kebijakan publik yang mana proses kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Jones dan Winarno terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa sosialisasi tidak menjadi bagian urgensi kebijakan yang tanpa adanya sosialisasi mengakibatkan proses kebijakan tidak bisa berjalan. Sosialisasi juga tidak memiliki keterkaitan secara langsung dan mendasar dengan ketiga tahap proses implementasi baik itu terhadap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan atau evaluasi kebijakan dikarenakan tanpa adanya keterkaitan tersebut tidak akan mengubah kedudukan setiap tahapan dalam proses kebijakan publik. Meskipun demikian, sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, isi atau substansi kebijakan perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran, dalam konteks ini sosialisasi berperan dalam rangka penyebarluasan isi atau substansi kebijakan kepada berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.

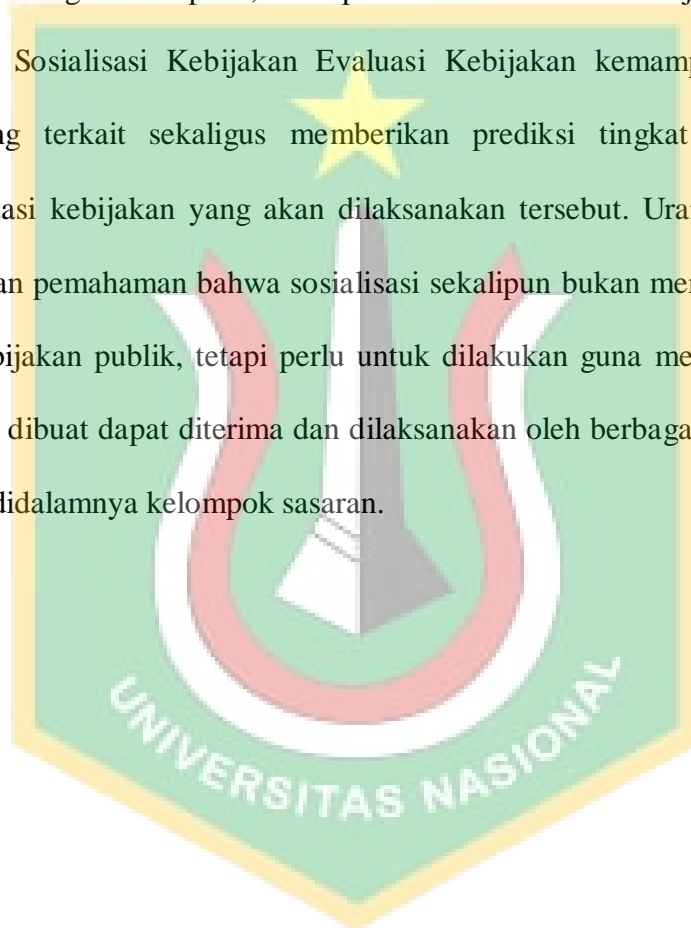
Kedua, setiap pihak yang terikat dan diatur dalam suatu kebijakan yang telah dibuat memerlukan pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, atas dasar tersebut sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan

---

<sup>12</sup> Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 88

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan peran yang harus diberikan.

Ketiga, sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dan masuk dalam proses implementasi kebijakan, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait, atas dasar tersebut sosialisasi akan memberikan gambaran mengenai respons, kesiapan dan Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut. Uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa sosialisasi sekalipun bukan merupakan bagian dari proses kebijakan publik, tetapi perlu untuk dilakukan guna memastikan kebijakan yang telah dibuat dapat diterima dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.



## II.2.2 BBM Bersubsidi

BBM oil ialah jenis minyak (*oil*) yang dihasilkan dengan cara penyulingan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak Mentah dunia pertama kali diproses di kilang untuk membuat bensin, termasuk minyak. Selain memproduksi minyak, kilang minyak bumi menghasilkan berbagai produk seperti minyak untuk nafta, *residu lilin sulfur ringan (LSWR)* dan aspal. Konsumsi minyak akan meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional Indonesia Darinto (2007) dan akan berkurang sementara sesuai dengan cadangan/pasokan nasional Indonesia sampai terlihat sumber cadangan baru ataupun konsumsi Listrik baru yang terbarukan. Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari RAPBN dan Laporan Keuangan Tahunan, ialah “pembayaran oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina (penyalur minyak independen di Indonesia, tanpa kemerdekaan sejak 2009). Suatu keadaan dimana pendapatan Pertamina. negara lebih kecil dari biaya penyediaan minyak ini, kalau bagus seperti biasanya, angka itu disebut laba bersih. Harga BBM bersubsidi di Indonesia ialah harga dari pemerintah dan digunakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada dasarnya pemerintah yang terlibat di DPR menetapkan harga BBM dengan mempertimbangkan harga awal BBM yang disuplai oleh Pertamina/pengusaha lain dan tingkat keterjangkauan (*willingness to pay*) masyarakat. BBM nonsubsidi ialah BBM yang harganya tidak dikendalikan oleh

pemerintah, pelaku usaha dipersilakan bersaing secara sehat dan menguntungkan, tentunya dengan cara UU Migas no. 22 Tahun 2001 dan amandemennya serta amandemen selanjutnya. Kebijakan Migas No. 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa mandat eksklusif Pertamina untuk memasok BBM dalam negeri akan berakhir (November) 2005 menurut Hanan Nograho, *Fuel Use: The Big Challenge*, Kompas, diakses 6 Juli 2004.

Pemerintah melalui BPH Migas mengajak pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha dari Kementerian ESDM untuk bersaing membuka usaha di Indonesia. MOPS (*Man Oil on Plate Singapore*) ialah referensi dan pedoman internasional yang digunakan oleh hampir semua negara Asia-Pasifik dalam menentukan penjualan/pemasaran minyak bumi dan produknya di Singapura. Menurut Robert J. Dolan dan Hermann Simon, permintaan harga internasional bervariasi di setiap negara, 16 tergantung pada ekonomi lokal, integrasi produk serupa dan pertukaran mata uang nasional. Meskipun Singapura bukan pengeksport minyak utama, menurut data jangka panjang, inilah masalahnya. Pelaksanaan MOPS telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1 April 2001 berdasarkan Keputusan Presiden. 45 Tahun 2001 dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2001.

- Pertalite (RON 90)

Pertalite ialah bahan bakar jenis distilat hijau murni. Warna hijau tersebut disebabkan adanya penambahan pewarna. Perlite sering digunakan untuk bahan bakar kendaraan dengan mesin bensin, seperti : mobil, motor, motor tempel, dll. Bahan bakar ini sering disebut motor gasoline ataupun bensin.

- Bahan Bakar Diesel (HSD) Diesel Kecepatan Tinggi (HSD)

Solar ialah jenis bahan bakar yang memiliki angka cetane 45, bahan bakar jenis ini terutama digunakan untuk transportasi, mesin diesel yang sering digunakan dengan pompa dan mesin injeksi, bahan bakar jenis ini ditujukan untuk transportasi. Mobil dan mesin tersedia

### II.2.3 Masyarakat

Menurut MJ Herskovits, komunitas ialah sekelompok orang yang mengikuti suatu cara hidup. Sementara itu JL. Gillin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa bangsa ialah kumpulan manusia terbesar yang memiliki budaya, adat istiadat, perilaku dan rasa persatuan. S.R. Steinmetz mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar yang mencakup sekelompok kecil individu dengan hubungan yang dekat dan teratur. Teori dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat ialah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, ataupun jaringan relasi sosial.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kehidupan diciptakan oleh sekumpulan orang yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Selama periode yang panjang ini, kelompok manusia yang tidak terorganisir menjadi sistem yang dominan, yaitu.

1. Organisasi memodifikasi dan memandu perilaku para anggotanya.
2. Akibat kelonggaran, mentalitas kelompok ataupun spirit de corps.

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.



Proses ini sering dilaksanakan secara tidak sadar dan diikuti oleh semua anggota tim dalam situasi coba-coba. Agar tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah, kelompok/grup disini ialah kelompok sosial orang-orang yang membentuk hubungan satu sama lain. Sebagai kemitraan. Grup tidak pasti. Contohnya ialah kelompok besar, kelas, kelompok primer dan sekunder, dan organisasi besar.<sup>8</sup>

Istilah komunitas berasal dari kata Arab, sariqa yang berarti bergabung ataupun bergabung. Sedangkan ras dalam bahasa inggris ialah ras yang berarti hubungan, perubahan dan rasa persatuan. Dalam dokumen lain, masyarakat juga disebut sistem sosial. Organisasi juga berarti suatu organisasi kehidupan manusia yang mempengaruhi menurut seperangkat kebiasaan yang berlangsung terus, dan yang dihubungkan dengan rasa identitas bersama.<sup>9</sup> Untuk pengertian konsep kemanusiaan secara umum akan dijelaskan oleh banyak ahli yaitu :

- a) Karl Marx, Masyarakat ialah: Struktur yang mencerminkan kerjasama ataupun pertumbuhan akibat konflik antara kelompok yang memiliki ekonomi.
- b) Max Weber, Masyarakat ialah: suatu struktur ataupun proses yang ditentukan terutama oleh harapan dan nilai-nilai yang berlaku di antara warganya.
- c) Selo Soemardjan, ialah etnis: orang yang hidup bersama dan menciptakan budaya.

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137-138.

<sup>12</sup> Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

### II.3 Kerangka Berpikir

